

**ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)
DENGAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh
DEDI SONATA**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) DENGAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh
Dedi Sonata

Perilaku korupsi sudah lama terjadi di Indonesia dan perilaku ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Budaya korupsi dapat berpengaruh dengan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan yakni *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan time series tahun 2012 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji hipotesis uji t diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,253 > 3,182$), dengan nilai sig. 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima yang artinya indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan berpengaruh secara signifikan. Hasil uji nilai koefisien R^2 dengan melihat nilai R Square sebesar 0,978 atau 97,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan sebesar 97,8 %. Hal ini juga menggambarkan persentase hubungan variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan adalah sangat kuat. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan berpengaruh secara signifikan dengan kemiskinan serta memiliki hubungan yang bersifat positif. Saran dari penelitian ini adalah Peningkatan kualitas pelayan publik yang bebas korupsi akan meningkatkan skor IPAK dimasa yang akan datang. Survei indeks perilaku anti korupsi perlu juga dilihat dari tata kelola pemerintahan. Dari sisi penyedia pelayanan publik agar bebas dari praktek korupsi dan profesional dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen SDM aparatur sipil negara yang anti korupsi, reformasi birokrasi yang ramping dari sisi struktur serta kaya fungsi. Dari sisi masyarakat sebagai penerima pelayan publik dilakukan dengan sosialisasi aturan dan prosedur layanan dengan semua media yang bisa diakses masyarakat. Dari sisi aturan harus mengacu pada prinsip efisien, efektif dan mudah dan wajar untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemberi layanan (Brokrasi).

Kata kunci: Perilaku Anti Korupsi, Kemiskinan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF RELATIONSHIP OF ANTI CORRUPTION BEHAVIOR WITH POVERTY NUMBERS IN INDONESIA

**By
Dedi Sonata**

The behavior of corruption has long happened in Indonesia and this behavior is one of the extraordinary crimes. Culture of corruption can affect the poverty rate in Indonesia. This study aims to find out how the relationship between the anti-corruption behavior index and the poverty rate in Indonesia. The type of this research is explanatory research with a quantitative approach. The population in this study is all households in Indonesia using secondary data from BPS and time series in 2012 until 2017.

The results of this study showed that the results of the hypothesis test of t-test is known that $t_{count} > t_{table}$ ($13.253 > 3.182$), with the value sig. 0.00 or smaller than 0.05, thus H_a is accepted which means that the index of anti-corruption behavior with poverty has a significant effect. The test results of the R2 coefficient value by looking at the R Square value of 0.978 or 97.8%. This shows that there is a contribution to the index of anti-corruption behavior with poverty of 97.8%. This also illustrates the percentage of the relationship between the anti-corruption behavior index variable and the poverty rate is very strong. Based on the results of the study, it was concluded that the anti-corruption behavior index variable with poverty rates significantly affected poverty and had a positive relationship. The suggestion from this research is that improving the quality of corruption-free public service will increase the IPAK score in the future. An anti corruption behavior index survey should also be seen from the governance of the public service provider so that it is free from corrupt and professional practices starting from the improvement of the anti-corruption civil service system. Lean bureaucratic reform of the structure and rich in function. The community side as recipients of public service carried out by disseminating service rules and procedures with all media that can be accessed by the public. Rules must refer to the principles of efficient, effective, and easy and reasonable to be fulfilled by the community and carried out by service providers (bureaucracy).

Keywords: Anti-Corruption Behavior, Poverty.

**ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI DENGAN
ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA**

Oleh
DEDI SONATA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

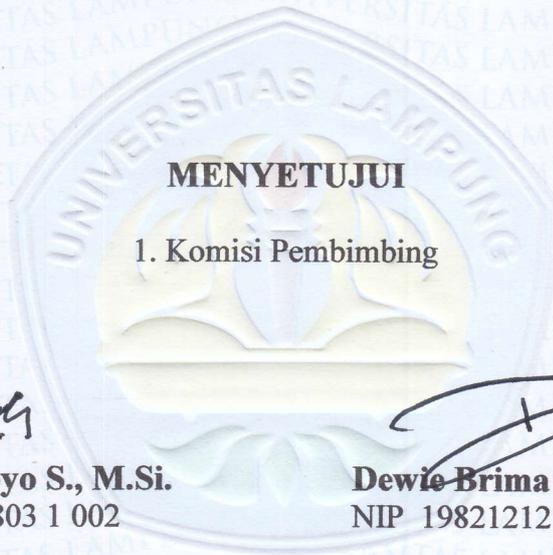
Judul Skripsi : ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) DENGAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Dedi Sonata

No. Pokok Mahasiswa : 1516041005

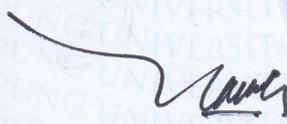
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

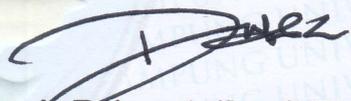
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Bambang Utoyo S., M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002

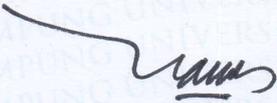

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP 19821212 200801 2 017

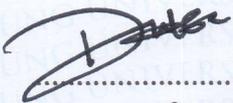
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

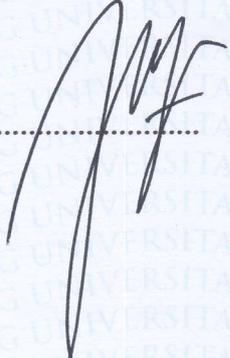

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Bambang Utoyo S., M.Si. 

Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. 

Penguji Utama : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. 



Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juli 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 12 Juli 2019

Penulis



Dedi Sonata

NPM 1516041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dedi Sonata, lahir pada tanggal 15 Maret 1996 di Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Penulis merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Ardi dan Ibu Linda Pertiwi, sebagai anak pertama dari 2

bersaudara dengan Adik Mareta Amelia. Penulis memulai pendidikan formal di SD N 1 Pekon Balak Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP KHM SUPI, Pekon Balak pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MA YAMSU, Pekon Balak pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Undangan) dan sebagai Penerima beasiswa BIDIK MISI. Pengalaman organisasi penulis yaitu pada jenjang SD penulis aktif sebagai anggota Pramuka pada priode tahun 2005/2009. Pada jenjang SMP penulis aktif sebagai anggota Pramuka dan OSIS pada priode tahun 2010/2012. Pada jenjang SMA penulis aktif sebagai anggota Pramuka dan OSIS pada priode 2013/2015.

Dan pada jenjang perguruan tinggi penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota pada periode kepengurusan tahun 2015/2016, dan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Dana dan Usaha (DANUS) pada periode kepengurusan 2016/2017. Pada bulan Desember-Februari 2017/2018 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Kibang Mulya Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOTTO

Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan ke surga (H.R Muslim)

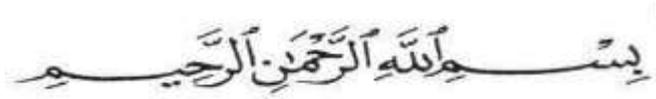
Ilmu ada hanya untuk menemukan dan menyampaikan kebenaran (Robert Maynard Hutchins)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukatnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri (Ibu Kartini)

Belajar dan terus mencoba, Dan selesaikan apa yang sudah kamu mulai

(Dedi Sonata)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya

Dengan segenap hati kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku:

Kedua orang tuaku
Bapakku Ardi dan ibukku Linda Pertiwi,
Kalianlah orang yang selalu menjadi
pendukungku, penyemangatku, sumber
inspirasi, dan segala sabarmu, pengorbananmu,
dan do'amulah yang selalu kau berikan untukku,
untuk menantikan keberhasilanku.

Adik Tercinta

Mareta Amelia kamulah satu-satunya saudariku
yang kelak akan kuperjuangkan untukmu dalam
hal pendidikan, kini engkau memang masih di
bangku Sd namun semoga kelak aku akan
menggantikan orang tua kita untuk
menyekolahkanmu sampai kependidikan yang
tinggi hingga sampai engkau meraih cita-citamu.

Keluarga Besar

Terimakasih atas segala dukungan dan do'a yang
selalu menyertaiku

Sahabat yang selalu memberikan warna dalam perjalanan hidupku, Guru
dan Dosen yang selalu memberikan ilmu dan kepada Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan S-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diakhiri dengan karya penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hubungan Indeks Perilaku Anti Korupsi Dengan Angka Kemiskinan Di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulis, terimakasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktu yang telah bapak berikan. Terimakasih banyak pak, semoga keiklasan dan ketulusan bapak dalam mendidik saya selama ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
2. Ibu Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing kedua penulis,

temakasih banyak atas segala ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan maupun diluar bimbingan. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal urusannya, semoga terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.

3. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si. Selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan ilmu didalam perkuliahan dan yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M. Si selaku Dekatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajarannya, terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, khususnya kepada Bu Rahayu, Bu Dian, Bu Dewi, Bu Meili, Bu Devi, Bu Ita, Bu Intan, Bu Selvi, Bu Ani, Bu Indri, Pak Eko, Pak Syamsul, Pak Nana, Pak Dedi, Pak Simon, dan terakhir saya ucapkan terimakasih kepada Prof Yulianto dan sekeluarga atas kebaikannya terutama selama 1 semester terakhir ini saya sudah di berikan tempat tinggal karena pasca KKN ekonomi saya selaku mahasiswa cukup rumit jadi saya di bolehkan untuk menempati rumah yang aman-aman tidak ada yang nempatin tiada kata yang saya pantas saya ucapkan selain ucapan terimakasih. Serta ucapan terimakasih juga kepada seluruh Dosenku atas ilmu

yang telah diberikan, yang telah saya peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang sangat berharga dalam kehidupan saya kedepannya. Dan terimakasih juga atas perhatian dan motivasinya yang bapak dan ibu berikan.

8. Mba Wulan dan pak Jo selaku Staf Administrasi yang banyak membantu penulis dalam kelancaran skripsi hingga terselesaikan dan Mas Edi sebagai penjaga gedung yang selalu nanya kapan lulus.
9. Terimakasih untuk Bak dan Makku tercinta, adikku tersayang yang takhenti-hentinya selalu dan selama-lamanya memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, nasehatnya, motivasinya, dukungannya, do'anya, pengorbanannya dalam segi moril maupun materil untukku, dan dalam peroses skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, ahirnya anakmu kini berhasil menyelesaikan study kuliahnya walaupun dari awal perkuliahan cukup penuh drama kehidupan karena ekonomi cukup sederhana dan kecil harapan untuk bisa kuliah, namun berkat do'a dan harapan dan nasib serta rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita sekeluarga yang mengantarkan kita hingga ketitik saat ini. Mak Baku Terimakasih..
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis tercinta M. Rifky, Ogi, Suryo, Ari, Bobi, nafi, Lia P, Farida, Aziz, Meyka, Cindy, Ahmad Rizki, Maul, Gandi. Dan terimakasih banyak untuk doa dan nasehatnya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sahabat kepengurusan HIMAGARA priode 2017/2018, Nafi, Rizeki, Cindy, Ana, Nila, Maul, Devi, Rifky, Ari, Aisyah, Ferdinan, Desta, Hastin, Hanif, kalian semua adalah orang-orang terpilih, orang-orang terpercaya, terimakasih untuk ilmu, motivasi, serta pengalaman organisasi

yang telah diberikan, semoga kedepannya kita dapat menjadi bagian dari orang-orang yang bisa merubah negara kita menjadi lebih baik lagi.

11. Sahabat seperjuangan ATLANTIK (angkatan tujuh belas mahasiswa administrasi publik): Terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama kurang lebih empat tahun ini.
12. Terimakasih untuk abang dan mbak HIMAGARA angkatan 2009 Alaseroban, 2010 Aduselon, 2011 Antimapia, 2012 Ampera, 2013 Alasmenara, dan 2014 Gelas Antik terimakasih untuk ngajarin tentang dunia perkuliahan, tentang organisasi, tentang berteman, tentang cara ngerjain skripsi ini, dengan cara kalian masing-masing yang seru banget pokoknya. Terimakasih untuk adik-adik HIMAGARA 2016 - 2019, atas kebersamaannya selama ini atas canda dan tawanya yang diberikan, yang sangat menyenangkan terutama saat hari-hari proses skripsi ini.
13. Teman-Teman KKN: Bagus, Ojil, Sema, Mely, Tuty, Adel terimakasih untuk kebersamaannya selama 2 bulan masa KKN untuk kisah sedih dan senang yang telah kita alami bersama, semoga kedepannya kita dapat terus menjadi teman selamanya. Dan keluarga Bu Halim serta Bapak Kepala Desa dan Sekdes, dan Mbah, serta adik-adik ku, dan semua masyarakat Warga Kibang Mulya Jaya, terimakasih untuk pelajaran pengalaman yang telah diberikan terutama tentang kehidupan yang sangat berkesan, semoga kedepannya kita dapat terus menjadi keluarga.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu. Terimakasih untuk waktu, dukungan, bantuan, dan do'anya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk bapak, ibu, dan teman-teman semua atas kebaikan dan bantuannya selama ini. Hanya ucapan terimakasih dan do'a yang dapat penulis berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandarlampung, Juli 2019
Penulis,

Dedi Sonata

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi

RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
I. PENDAHULUAN.....	1

A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	12
C.	Tujuan Penelitian.....	13
D.	Manfaat Penelitian.....	13
	1. Secara Teoritis	13
	2. Secara Praktis.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....		14
A.	Penelitian Terdahulu.....	14
B.	Tinjauan Tentang Perilaku dan Anti Korupsi.....	16
	1. Teori Perilaku Dalam Administrasi Negara.....	16
	2. Perilaku Anti Korupsi	18
C.	Tinjauan Etika Dalam Administrasi Negara.....	19
D.	Tinjauan Tentang Perspektif Etika Birokrasi Publik.....	20
E.	Tinjauan Tentang Korupsi	24
	1. Pengertian Korupsi	24
	2. Definisi Korupsi.....	25
	3. Faktor Penyebab Korupsi.....	27
F.	Tinjauan Tentang Kemiskinan	29
	1. Pengertian kemiskinan	29
	2. Indikator Kemiskinan	30
	3. Faktor–Faktor Penyebab Kemiskinan.....	31
G.	Kerangka Pikir.....	33
H.	Hipotesis	35
III. METODE PENELITIAN.....		37
A.	Tipe Penelitian.....	37
B.	Lokasi Penelitian	37
C.	Populasi Penelitian	37
D.	Jenis dan Sumber Data	38
E.	Teknik Pengumpula Data	39
F.	Variabel Penelitian	39
	1. Variabel bebas/independen (variabel X).....	39
	2. Variabel terikat/dependen (variabel Y).....	39
G.	Definisi konseptual.....	40
H.	Definisi Operasional.....	41
I.	Teknik Pengolahan Data Penelitian	43
	1. Teknik Analisis Statitik Deskriptif	43

2.	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	43
3.	Alur Penelitian	44
J.	Uji Hipotesis.....	44
1.	Uji parsial (Uji t).....	45
2.	Uji Simultan (uji F).....	46
3.	Uji korelasi (r) atau Determinasi (R^2).....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		49
A.	Gambaran Umum Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017	49
B.	Gambaran Umum Profil Indeks Perilaku Anti Korupsi	59
1.	Dasar Hukum	59
2.	Tujuan IPAK.....	60
3.	Ruang Lingkup	60
4.	Cakupan	60
5.	Model Berpikir dan Dimensi Korupsi di Indonesia.....	60
C.	Hasil Analisis Data.....	62
1.	Hasil Analisis Data Deskriptif	62
2.	Analisis Regresi Linear Sederhana	64
3.	Uji Hipotesis	65
D.	Pembahasan	69
V. KESIMPULAN DAN SARAN		84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Dimensi. Tahun 2012-2015, dan 2017.....	10
2. Penelitian Terdahulu	14
3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	48
4. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah, September 2016 – September 2017.....	51
5. Persentase Dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2017 .	52
6. Garis Kemiskinan Dan Perubahannya Menurut Daerah, September 2016 – September 2017.....	53
7. Daftar Komoditi Yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya (%), September 2017	54
8. Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2016 – September 2017.....	56
9. <i>Descriptive Statistics</i>	63
10. Analisis Regresi Linear Sederhana	64
11. Uji t	66
12. Hasil Uji f.....	67
13. Hasil Uji R^2	68
14. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1999–2017	2
2. Kerangka Pikir	35
3. Diagram Alur Penelitian	44
4. Jumlah dan persentase penduduk miskin , 1999-2017.....	49
5. Skema Model Berfikir Korupsi Skala Kecil yang Dicakup pada SPAK	61
6. Dimensi Korupsi Skala Kecil di Indonesia	62
7. Skor Indeks Persepsi dan Pengalaman Masyarakat dan Skor IPAK Indonesia Tahun 2012 Sampai Tahun 2017	75

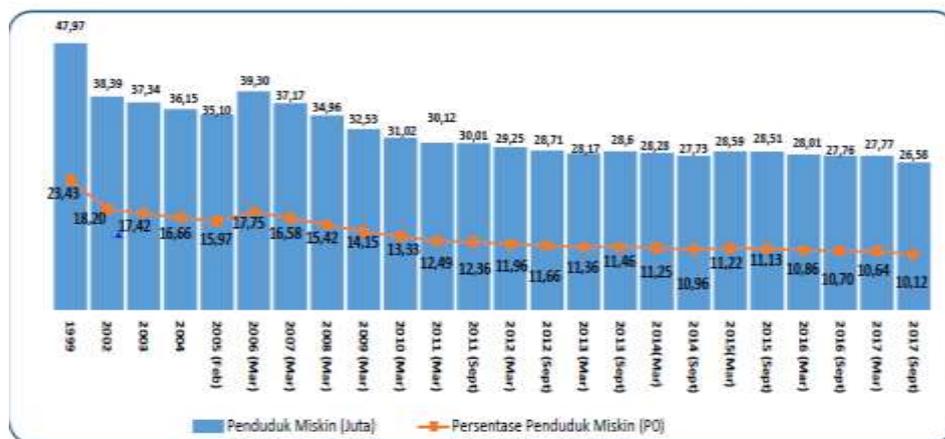
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi fokus utama untuk diatasi karena kemiskinan tidak hanya terjadi pada satu generasi saja, tetapi juga bisa menjalar ke generasi-generasi berikutnya. Fenomena kemiskinan yang terjadi secara terus-menerus dari generasi ke generasi merupakan sebuah indikasi terjadinya fenomena yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama oleh negara-negara di dunia. Hal ini sesuai dengan amanat *Sustainable development goals* (SDGs) yaitu *non poverty* yang diletakkan sebagai fokus utama. Poin inilah yang menjadi landasan negara-negara diseluruh dunia untuk mengentaskan kemiskinan, tidak terkecuali di Indonesia (Nugroho, 2018).

Hal ini disebabkan karena kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh Naranjo (2012), kemiskinan adalah penyebab utama kelaparan, keterlantaran, marginalisasi, dan penyakit sosial lainnya di seluruh dunia. Melihat banyaknya aspek yang dipengaruhi oleh kemiskinan, maka tidak salah bahwa fenomena kemiskinan ini menjadi salah satu masalah utama yang diperangi oleh negara-negara di dunia (Nugroho, 2018).

Keadaan kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya sangat beragam bisa kita lihat pada periode Tahun 1999 sampai dengan September 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 1999 sampai dengan September 2017 terdapat pada tabel di bawah ini.



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1999–2017

Sumber: BPS 2017(<https://www.bps.go.id/> diakses 08 Oktober 2018: pukul 20:05 WIB)

Secara umum ada beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia yang terus berkembang, diantaranya:

- Di lihat dari faktor individu => Penyebab individual yakni kemiskinan akibat dari perilaku atau kemampuan dari orang tersebut, misalnya: malas, atau menunggu yang sifatnya spekulasi.
- Di lihat dari faktor keluarga => Faktor keluarga bukanlah faktor individu yang di keluarkan/di lontarkan oleh sekelompok orang yang mengatakan kemiskinan tidak akan timbul jika ada kemauan yang kuat dari diri sendiri.

Faktor ini menghubungkan kemiskinan karena keadaan dan pendidikan keluarga.

- c. Di lihat dari faktor subkultural => Penyebab sub-kebudayaan atau kebiasaan yang menghubungkan faktor kemiskinan di sebabkan oleh kehidupan sehari-hari yang di pelajari atau di jalankan dalam lingkungan.
- d. Di lihat dari faktor agensi => Penyebab agensi sosial melihat kemiskinan di sebabkan dari orang lain, termasuk perang, Pemerintah, dan ekonomi.
- e. Di lihat dari faktor struktur => Penyebab struktural sering menimbulkan pertanyaan, faktor ini erat kaitannya dengan struktur sosial baik dalam masyarakat maupun dalam sosial.

Berdasarkan Ilmu Sosial faktor yang menyebabkan seseorang, masyarakat bahkan suatu negara menjadi miskin, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan individual adalah kemiskinan yang menimpa individu tertentu dalam suatu masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kurangnya ilmu pengetahuan, tidak aktif/kreatif, malas, dan sebagainya.
2. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang menimpa masyarakat yang disebabkan non-individual, maksudnya kemiskinan terjadi karena adanya pengaruh dari para orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di wilayah tersebut. Misalnya terjadinya kezaliman dan adanya pemimpin yang korupsi.

Menurut Basyaib (2002) penyebab kemiskinan misalnya dari dampak korupsi sangat terlihat pada kasus di Indonesia saat ini. Banyak pengeluaran di Indonesia yang cenderung anti-kaum miskin. Sebagai contoh, subsidi yang semula

dimaksudkan untuk pemerataan pendapatan kepada kaum miskin terbukti hanya menguntungkan kaum yang berada. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) misalnya, 70% - 90% dinikmati oleh orang kaya yang pada gilirannya menyebabkan porsi pengeluaran untuk kegiatan ekonomi yang didominasi kelompok kaum miskin menjadi berkurang (Indrawan & Widiyanto, 2017).

Perilaku korupsi sudah lama menjadi parasit yang secara sengaja masuk kedalam keadilan dan kebijakan serta mengorbankan kepentingan masyarakat. Kerusakan yang ditimbulkan juga tidak sederhana karena berskala besar dengan dampak jangka panjang, sehingga pada banyak kasus dapat dilihat akibatnya dengan penurunan kualitas kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya mendapat prioritas utama. Salah satu penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi (Suhariyanto, 2017).

Bentuk lain dari perilaku korupsi adalah pemberian upeti dan komisi. Metode ini adalah salah satu pola yang sering dilakukan oleh para pejabat terhadap mitra di luar pemerintahan atau mitra dalam struktur pemerintahan. Pola ini merupakan tindak pidana yang melibatkan pemberian sejumlah hadiah kepada seseorang dengan maksud tertentu agar penerima hadiah melakukan (mengabulkan) keinginannya. Perubahan perilaku yang demikian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk barang-barang berharga, referensi, hak istimewa, manfaat atau janji-janji yang dapat

digunakan untuk membujuk atau mempengaruhi seseorang tindakan, suara, atau pengaruh dalam jabatan publik (Ibrahim & Yousuf, 2018).

Terlihat juga pada fenomena pelayanan publik saat ini adanya korupsi skala kecil atau *petty corruption* di sektor pelayanan publik, di antaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), kepolisian, peradilan, layanan kesehatan, kantor desa dan kelurahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kantor Urusan Agama, serta RT/RW. Sebenarnya permasalahan ini harus segera di atasi oleh para pemangku kepentingan atau pemerintah (birokrat) untuk melakukan penguatan prosedur operasional terstandar dan pengetatan pengawasan untuk menimalisasi praktik penyogokan, pemerasan dan pungutan liar agar dampak korupsi skala kecil tetapi masif ini bisa ditekan agar korupsi skala besar dapat terhindar sejak dini, karena permasalahan korupsi yang sebenarnya adalah muncul karena kurang pemahaman masyarakat tentang korupsi, karena memberikan uang terhadap pengurusan administrasi suatu dokumen yang lebih dari peraturan yang berlaku itu merupakan salah satu cikal bakalnya timbul korupsi (Marhaeni, 2017).

Permasalahan ini juga terlihat pada era reformasi yang disebut juga sebagai era kebangkitan demokrasi. Esensi reformasi nasional ini adalah sebagai koreksi yang terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Sasaran reformasi nasional adalah bangsa Indonesia bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka, teratur dan demokratis. Salah faktor yang penting ikut andil dalam pengembangan demokrasi adalah birokrasi. Demokrasi agar efektif, memerlukan dukungan birokrasi antara lain untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan

publik secara efektif dan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial. Proses demokratisasi birokrasi di Indonesia misalnya sejak tahun 1993-2003 telah membawa beberapa dampak positif, seperti; 1) Terdapat perubahan terhadap hubungan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, contohnya pada saat rejim orde baru eksekutif begitu dominan terhadap lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, maka sejak reformasi khususnya pemilu 1999 hubungan itu sejajar dan setara. 2) Adanya semangat untuk menjalankan program *clean government*, terlepas dari prosesnya, birokrasi ingin merubah kesan dari sebagai sarang KKN menjadi pemerintahan yang bersih. 3) Kebijakan-kebijakan yang diambil birokrasi berusaha mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. 4) Pemerintah atau birokrasi memberikan ruang gerak yang bebas kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut berpartisipasi terhadap jalannya pembangunan dan pemerintahan (Sulistio, 2016).

Demokrasi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar untuk menganut demokrasi dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat. Pemimpin negara dipilih oleh rakyat, pemimpin yang terpilih itu harus mempertanggungjawabkan tugas dan kepemimpinannya pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipercaya sebagai wakil rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berjalan hingga saat ini.

Pasca reformasi, Indonesia sempat beberapa kali mengalami pergantian presiden. Meskipun begitu, sistem politik di Indonesia belum pernah mengalami perubahan bahkan tidak pernah terpikirkan untuk mengganti demokrasi dengan sistem lainnya. Pemerintah Indonesia yakin bahwa demokrasi merupakan sistem politik

yang paling cocok untuk diterapkan. Sepanjang perjalanannya, setiap individu di Indonesia memang telah merasakan kebebasan. Mereka dapat mengatur sendiri kehidupannya, memilih apa yang mereka kehendaki, serta semuanya itu dilindungi oleh hukum. Selain itu, aktivitas negara juga diimbangi dengan lembaga dan institusi yang memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, transparan, dan tidak melanggar hukum dengan mengutamakan kepentingan rakyat (publik). Indonesia telah berkali-kali melakukan pemilihan umum mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Semangat demokrasi di Indonesia tampaknya sangat kuat dan nilai-nilainya pun dijunjung tinggi oleh setiap individu (Martha, 2014).

Sementara dalam melihat perjalanan demokrasi di Indonesia masih dianggap kurang dan belum mencapai makna demokrasi yang sesungguhnya. Ginandjar (2008) menjadi salah satu pihak yang mengkritik perjalanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia lebih sering menonjolkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan rakyat, padahal di dalam demokrasi rakyat dinilai memegang kedaulatan sepenuhnya. Konflik antargolongan lebih sering terjadi karena setiap golongan ingin kepentingannya yang didahulukan dan tanpa sadar kepentingan rakyat mereka tinggalkan. Tentu saja kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih mengutamakan pemenuhan terhadap kepentingan rakyat. Pemerintahan akhirnya dijalankan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya fokus pada kepentingan rakyat sehingga dinilai belum efektif, efisien, kredibel, dan profesional. Kemudian, praktik demokrasi di Indonesia juga belum bisa terlepas sepenuhnya dari politik uang, tindakan korupsi, dan tindakan-tindakan terlarang lainnya.

Semuanya itu tidak terlepas dari adanya kepentingan golongan dan kepentingan pribadi yang lebih diutamakan. Akhirnya mempertaruhkan nasib dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, sehingga tidak heran jika kemiskinan tidak mau lepas bahkan melekat dalam tubuh masyarakat Indonesia (Martha, 2014).

Pentingnya perhatian korupsi dan kemiskinan juga terlihat dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik seperti penelitian dari (Chetwyand, Spectar, & Chetwyand, 2003) yang melihat korupsi dan kemiskinan bisa dilihat dari dua Model ekonomi dan model tata kelola (model pemerintahan), menurutnya ternyata ada indikasi model tata kelola yang juga bisa mempengaruhi dari keduanya yaitu model tata kelola. Model tata kelola menegaskan bahwa arah hubungan antara perilaku anti korupsi dengan kemiskinan dipengaruhi faktor tata kelola, yang pada akhirnya berdampak pada tingkatan kemiskinan. Pertama, korupsi mengurangi kapasitas pemerintahan, yaitu akan melemahkan lembaga-lembaga politik dan partisipasi warga dan mengarah ke layanan pemerintah terhadap kualitas yang lebih rendah dan infrastruktur. Orang miskin menderita secara tidak proporsional serta pelayanan publik berkurang. Korupsi secara konsisten berkorelasi dengan tingkat putus sekolah tinggi dan tingkat tingginya kematian bayi. Kedua, gangguan tata kelola pemerintahan meningkatkan kemiskinan dengan membatasi pertumbuhan ekonomi karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan korupsi. Ketiga, korupsi yang mengurangi kapasitas pemerintahan juga dapat menimbulkan kritis jaminan yaitu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Kepercayaan menurun dan juga sebagai elemen yang penting dari modal sosial.

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PPK, jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014. Visi dan Misi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diturunkan dalam enam strategi yang salah satu strateginya adalah meningkatkan pendidikan dan budaya anti korupsi. Untuk mendukung strategi tersebut, Badan Pusat Statistik bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi. Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, kecuali ditahun 2016. Untuk tahun 2017 SPAK dilaksanakan pada bulan Februari yang mencakup 33 Provinsi dan jumlah sampel mencapai 10.000 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional (Marhaeni, 2017).

Badan Pusat Statistik menyusun indeks perilaku anti korupsi ini dengan menggunakan dua dimensi besar, yakni persepsi masyarakat yang berupa penilaian mereka terhadap perilaku anti korupsi di masyarakat serta pengalaman masyarakat. Pendapat ataupun persepsi masyarakat tentang akar korupsi, pendapat tentang kebiasaan di masyarakat pada bagian ini berisi pendapat masyarakat tentang kebiasaan sehari-hari dalam aktivitas pada lingkup keluarga, komunitas dan dalam berurusan dengan pelayanan publik. Permisifitas masyarakat terhadap korupsi pertama-tama dilihat dari pendapat dan anggapan masyarakat dalam menilai kewajaran atau tidaknya terhadap perilaku-perilaku yang rentan menjadi akar budaya korupsi. Selanjutnya pada bagian pengalaman masyarakat. Pada

bagian ini berisi pengalaman masyarakat dalam berurusan dengan pelayanan publik. Pengalaman masyarakat berurusan dengan pelayanan publik ini ditanyakan kepada 10 jenis pelayanan publik. Instansi yang terkait antara lain RT/RW, Kantor Desa/Kecamatan, Polisi, PLN, Puskesmas/Rumah Sakit, Guru, Lembaga Peradilan, KUA, DISDUKCAPIL, BPN. Dari dua dimensi persepsi dan pengalaman inilah yang menjadi dasar hasil dari survei indeks perilaku korupsi setiap tahunnya dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017 (Marhaeni, 2017).

Hasil dari survei perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 bisa dicermati pada tabel di berikut ini.

Tabel 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Dimensi. Tahun 2012-2015, dan 2017

No	Dimensi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2017
1	Indeks Persepsi	3,54	3,66	3,71	3,73	3,81
2	Indeks Pengalaman	3,58	3,58	3,49	3,39	3,60
3	IPAK Indonesia	3,55	3,63	3,61	3,59	3,71

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2017.

Dari hasil pengukuran Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK 2017), terlihat fenomena yang menarik untuk dicermati Indeks perilaku menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke 2017. Hal ini menggambarkan pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku korupsi semakin baik. Sebaliknya pada dimensi pengalaman terjadi perubahan dari pola tren yang menurun di tahun 2012-2015 menjadi meningkat di tahun 2017. Fenomena indeks perilaku anti korupsi di atas menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap

korupsi semakin baik dan penilaian angka kemiskinan di Indonesia juga mengalami penurunan pada bulan Maret dan September dari angka 10,64 menjadi 10,12 pada tahun yang sama yaitu tahun 2017. Berdasarkan fenomena ini, maka peneliti ingin melihat apakah ada hubungannya indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan.

Penelitian terdahulu menunjukkan ada hubungannya antarkorupsi, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kombinasi korupsi dan kemiskinan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel korupsi dan kemiskinan berpengaruh dalam menentukan peramalan pertumbuhan ekonomi di masa datang. Dampak kombinasi korupsi dan kemiskinan merupakan variabel yang layak untuk dipertimbangkan di masa depan. Dampak kombinasi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan korupsi menunjukkan bahwa kombinasi antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi. Informasi yang cukup tentang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masa lalu sangat penting untuk meramalkan korupsi di masa yang akan datang (Waluyo, 2010).

Menurut Negin (Mahkota Negara & Nasrudin, 2013), melakukan studi pada 97 negara di dunia pada tahun 1997 – 2006 dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsi yang menyebabkan kemiskinan. Ada hubungan kausalitas satu arah, dari korupsi terhadap kemiskinan. Sementara itu, Chaudhary melakukan penelitian hubungan antara korupsi dan kemiskinan di Pakistan. Dengan menggunakan periode

penelitian di tahun 1995 -2009 dan beberapa variabel kontrol seperti inflasi, pengeluaran pemerintah, dan GDP, didapatkan bahwa korupsi berdampak secara positif terhadap kemiskinan.

Sementara menurut Rahayu (Mahkota Negara & Nasrudin, 2013) penelitiannya menggunakan *generalized methode of moments/dynamic panel data* (GMM/DPD) dan berfokus pada *capability poverty* dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini menguji hubungan kausal *Granger* antara korupsi dan kemiskinan dengan data dari 9 negara ASEAN selama periode pengamatan 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsi yang menyebabkan kemiskinan.

Terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan. Dengan melihat hasil pengukuran indeks perilaku anti korupsi (IPAK) 2017, menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012-2017, maka hasil ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin paham dengan berbagai macam tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Hubungan Indeks Perilaku Anti Korupsi Dengan Angka Kemiskinan di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui deskripsi dan analisis tentang hubungan indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan wacana pemikiran bagi Ilmu Administrasi Negara mengenai perilaku anti korupsi dalam keilmuan perilaku dan etika administrasi negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang baik kepada mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dan juga menjadi rekomendasi kebijakan dalam memberantas berbagai macam tindakan korupsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Negin (2010)	Melakukan penelitian tentang hubungan korupsi dan kemiskinan studi pada 97 negara di dunia pada tahun 1997 – 2006	Kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsi yang menyebabkan kemiskinan. Ada hubungan kausalitas satu arah, dari korupsi terhadap kemiskinan.
2	Waluyo (2010)	Hubungan kausalitas antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan pada 100 negara yang tersebar di lima benua, baik negara maju maupun berkembang pada tahun	Korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya inefisiensi pada sisi pengeluaran pemerintah kurang memberikan pengaruh positif langsung pada kesejahteraan. Hal ini dikarenakan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		1995 – 1997.	kemungkinan alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat atau terjadi korupsi pada alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Di negara muslim yang tingkat korupsinya tinggi memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negaramuslim yang tingkat korupsinya rendah.
3	Sajeev Gupta, Hamid Davoodi, dan Rosa Alonso-Terme (1998)	<i>“Does Corruption Affect IncomeInequality and Poverty?”</i>	Korupsi mengganggu fungsi daripemerintah sebagai pengalokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi, dan redistribusi pendapatan dimana fungsi-fungsi ini mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan

Sumber: *Hasil Kajian Penulis, 2018*

Penulis menggunakan beberapa referensi di atas untuk memperkaya hasil penelitian, penulis menggunakan variabel penelitian yang berbeda dari ketiga referensi ini yaitu variabel indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan, maka penelitian ini bersifat hal yang baru karena mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dari variabel yang sebelumnya guna menghindari hasil penelitian dan permasalahan yang sama.

B. Tinjauan Tentang Perilaku dan Anti Korupsi

1. Teori Perilaku Dalam Administrasi Negara

Menurut (Ali, 2011) setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta dipengaruhi oleh pemikiran rasional maka muncullah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori struktural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip *non-hierarkis* teori perilaku dalam administrasi melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi.

Teori ini mendapat pengaruh dari pemikiran sosiologis, psikologis sosial dan antropologi. Pengaruh sosiologis karena manusia administrasi adalah manusia yang berada dalam kelompok kerja sama yang sesungguhnya menjadi aspek yang diperhatikan sosiologi. Aspek psikologi sosial, karena manusia administrasi tidak saja sebagai *human being* yang memiliki cita, karsa, dan rasa tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang dalam berperilaku, keperilakuan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia berada. Aspek antropologi, manusia administrasi adalah seorang individu yang dihargai martabatnya selaku manusia yang memiliki ranah dalam kesatuan yang tidak terpisahkan, meliputi ranah jasmani yang harus dipahami melalui cipta, karsa dan rasa serta ranah spiritual yang harus diisi oleh nilai-nilai moralitas yang mendasar atau yang paling mendasar adalah nilai-nilai agama. Oleh karena itu aspek perilaku ini dan nilai mendapat tempat dalam pemahaman tentang administrasi sekaligus dalam aplikasinya. Aspek perilaku administrasi, organisasi formal dan motivasi pribadi menjadi fokus utama.

Menurut (Notoatmodjo, 2010) perilaku adalah totalitas yang terjadi pada orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, perilaku adalah merupakan keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktifitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara faktor internal dan eksternal. Perilaku seseorang adalah sangat kompleks, dan mempunyai bentangan yang sangat luas.

Menurut Anggara (2012) Teori perilaku, atau *the behavior theory of organization* berpendapat bahwa ada tidaknya, baik buruknya organisasi tergantung pada sikap kelakuan (*behavior, gedraging*) para anggotanya. Salah seorang penganut teori ini yang terkenal adalah Herbert A. Simon dalam bukunya "*administrative behavior*" masalah organisasi menurut penganut teori ini adalah bagaimana membuat warga organisasi itu bersikap, berfikir dan bertindak laku sebagai "manusia organisasi" (*organization man*) yang tepat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teori perilaku administrasi negara merupakan keseluruhan pemahaman dan aktifitas ada tidak, baik buruknya organisasi tergantung pada sikap kelakuan (*behavior, gedraging*) para anggotanya. Oleh karena itu perilaku anti korupsi merupakan wujud dari perilaku administrasi yang menunjukkan bahwa perilaku korupsi merupakan perilaku yang tidak baik dalam suatu organisasi tertentu bahkan dalam suatu masyarakat secara luas. Oleh karenanya manusia administrasi tidak saja sebagai *human being* yang memiliki cita, karsa, dan rasa tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang dalam berperilaku, keprilaku dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia berada. Maka perilaku korupsi mempengaruhi lingkungan sosial yang ada dan dipandang

sebagai perilaku yang tidak baik maka perlu dilahirkan perilaku yang baik dengan adanya perilaku anti korupsi.

2. Perilaku Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan). (Dwiputrianti, 2009).

Pencegahan korupsi dalam hal kaitan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada peluang kedua yaitu perbaikan manusianya yang memiliki nilai etika yang baik (moral). Perbaikan manusia yang mempunyai nilai etika (moral) dilakukan dengan cara melakukan hal-hal sebagai berikut: pertama, memperbaiki moral manusia sebagai manusia yang berperilaku baik. Salah satu perilaku anti korupsi di dalam masyarakat juga perlu mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya setiap pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya atau masyarakatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Kedua, memperbaiki moral sebagai suatu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/ klan/ suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah. Ketiga, meningkatkan kesadaran

hukum, dengan cara sosialisasian pendidikan anti korupsi. Keempat, mengentaskan kemiskinan dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan. Kelima, memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan (Dwiputrianti, 2009).

Jadi dari penjelasan di atas bahwa perilaku anti korupsi menunjukkan sikap dalam perbaikan manusianya atau individu dituntut agar memiliki nilai etika yang baik (moral) sehingga muncullah pemahaman bahwa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral, maka untuk itu diperlukan sebuah pemahaman tentang etika yang baik dalam berperilaku sehingga perbuatan perilaku korupsi bisa teratasi dan dapat dihindari.

C. Tinjauan Etika Dalam Administrasi Negara

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin: *mos* (jamak: *mores*) yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah *morale* atau moril, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moril bisa berarti semangat atau dorongan batin. Terdapat juga istilah norma yang berasal dari bahasa Latin: (norma: penyiku atau pengukur), dalam bahasa Inggris norma berarti aturan atau kaidah. Dalam kaitannya dengan perilaku manusia, norma digunakan sebagai pedoman atau haluan bagi perilaku yang seharusnya dan juga untuk menakar atau menilai sebelum ia dilakukan.

Menurut Gie (Kumorotomo, 2015) istilah etika atau moral berdasarkan keyakinan bahwa keduanya merujuk kepada persoalan yang sama, meskipun

berasal dari dua istilah yang berbeda, tetapi makna epistemologisnya sama. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral, dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada tingkah-laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa etika yang berasal dari suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai baik dan buruk bagi manusia bahkan secara eksplisit etika merupakan ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral (sebagai tindakan yang mendorong untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma). Maka dengan hal ini kaitannya dengan penelitian ini bahwa etika memberikan dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dengan cara menumbuhkan adanya sikap anti korupsi dan menjauhi perilaku korupsi.

D. Tinjauan Tentang Perspektif Etika Birokrasi Publik

Gilman dan Lewis (Sulistio, 2016) berpendapat secara tradisional, etika birokrasi publik dapat dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran normatif dan aliran struktural.

Perspektif normatif yang sering dipakai dalam pengembangan organisasi meneliti bagaimana nilai-nilai etis dikalkulasikan dan dilaksanakan dalam organisasi. Sedangkan dari perspektif struktural, akan dilihat dari unsur-unsur legal-formal, yaitu dilakukan pengawasan oleh pejabat struktural, yang melanggar norma/hukum.

Dalam prakteknya kedua perspektif ini belum dibatasi ruang lingkungannya, sehingga masih terdapat dikotomi antara normatif dan struktural, terutama mengenai persoalan pilihan moral dan pertimbangan moral serta kepatuhan terhadap hukum/aturan yang berlaku. Kondisi ini mengandung dilematis, pada diri seseorang pejabat apakah dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk karena aturan hukum yang berlaku atau karena adanya pilihan-pilihan moral.

Masing-masing aliran dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam konteks fenomena korupsi, sebagai berikut:

1. Perspektif normatif

Gilman dan Lewis (Sulistio, 2016) berpendapat bahwa pejabat publik (birokrasi) perlu memainkan aturan dan memaksimalkan nilai-nilai dengan penekanan pertama-tama pada tindakan yang benar. Dengan cara seperti ini, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, karena memaksimalkan nilai-nilai etis berarti berbuat kebijakan-kebijakan. Tidak berhenti disitu saja, tetapi seseorang pejabat publik yang baik berkewajiban moral untuk mengupayakan agar kebijakan juga menjadi karakter masyarakat.

Etika normatif menurut Ruslan (Sulistio, 2016) yakni etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia

apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini, pejabat publik yang melakukan tindakan-tindakan etis baik berdasarkan norma/aturan maupun kebijakan-kebijakan yang tepat mencerminkan moral kepemimpinannya. Gilman dan Lewis (Sulistio, 2016) kasus korupsi, penyuapan/sogok dan penerimaan upeti oleh seserang pemimpin merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dan ancaman stabilitas.

Dengan melihat hal ini salah satu upaya pemerintah yang sudah dilakukan seperti sejak tahun 2012 membuat Perpres No. 55 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Badan Pusat Statistik untuk melakukan survei indeks perilaku anti korupsi di seluruh Indonesia.

2. Perspektif struktural

Kasus korupsi yang diangkat dalam konferensi yang meliputi penyuapan, korupsi, dan pemberian upeti karena adanya konflik kepentingan; Dimana fenomena ini setia dan sepanjang adanya peluang, adanya faktor kerakusan dan egois. Gilman dan Lewis (Sulistio, 2016) berpendapat bahwa fenomena keberpihakan dan penyuapan tersebut sangat bertentangan dengan nilai keadilan. Hal ini jika dilakukan maka akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dan dari sinilah timbul ketidakadilan itu muncul.

Sifat rakus dan egois pejabat dapat mendorongnya menerima suap atau berusaha dengan berbagai dalih agar ia disuap oleh pihak yang berkepentingan. Disini timbul konflik kepentingan antara pemberi suap dan penerima suap. Perbuatan ini sering ditutupi agar tidak muncul kepermukaan. Namun demikian, pengawasan masyarakat dan media massa lebih efektif sehingga korupsi tersebut dapat juga terungkap.

Sehubungan dengan itu, aliran ini menghendaki agar korupsi terus menerus diaudit oleh lembaga pengawasan di luar pemerintah. Aplikasinya di Indonesia dilakukan beberapa tipe pengawasan normatif, yaitu:

- a. Pengawasan atasan langsung (waksat).
- b. Pengawasan fungsional yaitu irjen departemen. Irjenbang, BPKP, dan Badan Pemerintah Keuangan.
- c. Pengawasan legislatif (wasleg) yang dilakukan oleh DPR/DPRD sekaligus pengawasan politik.
- d. Pengawasan masyarakat (wasmas) yang dilakukan oleh masyarakat melalui media masa, atau dengan kata lain disebut: *citizen control*.

Kebijakan publik yang telah ditetapkan agar tetap efektif dan tidak rendah dalam mendapatkan kepercayaan publik (*low levels of public trust*) maka aturan hukum itu haruslah dijadikan pedoman bagi aparat pemerintah untuk tidak melanggarnya. Contohnya di Indonesia UU nomor 11 tahun 1980 yang mengatur tentang korupsi suap dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, menurut pendekatan Normatif dan Struktural, korupsi harus dibasmi melalui berbagai cara anantara lain salah

satunya adalah “adanya survei indeks perilaku anti korupsi” yang diamanatkan oleh Perpres nomor 55 tahun 2012 yang mengamanahkan Badan Pusat Statistik melakukan survei terkait indeks perilaku anti korupsi pada tingkat nasional dengan populasi 33 provinsi dan sampel 10.000 rumah tangga. Hal ini sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi dan nilai-nilai etis terus berkembang dalam administrasi publik dan terlepas dari perilaku korupsi, suap, penyogokan dan sejenis tindakan lainnya yang bisa merugikan orang banyak.

E. Tinjauan Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "Korupsi" berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak, busuk, memakai barang/uang yang dipercayakan, dapat disogok. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan (negara) tempat bekerja. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Echol (Ramli, 2017) Kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris *corruption*. Sebetulnya kata *corruption* tersebut berasal dari kata dalam bahasa Latin “*corruptus*” yang berarti “merusak habis-habisan”. Kata “*corruptus*” itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere*, yang tersusun dari kata *com* yang berarti “menyeluruh” dan *rumpere* yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada pelaku yang tak jujur itu.

Korupsi adalah sebuah kata yang mempunyai banyak arti. Arti kata korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Ramli, 2017).

Jadi korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang banyak bahkan suatu bangsa. Karena tindakan korupsi hanya bisa menguntungkan seseorang atau sekelompok orang saja, sementara sesuatu yang biasanya dikorupsi itu hak milik orang lain yang harus diberikan kepadanya, mengkorupsi sama saja mencuri dan merampas hak-hak yang tidak hanya berupa uang namun juga barang dan jasa.

2. Definisi Korupsi

Definisi korupsi menurut Desta (Kurniawan, 2009) dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Definisi yang berpusat pada jabatan publik (*public office centred definitions*).
- b. Definisi yang berpusat pada pasar (*market centred definitions*)

- c. Serta definisi yang berpusat pada kepentingan publik (*public interest centred definitions*).

Definisi yang berpusat pada jabatan publik misal-nya definisi yang dikemukakan oleh Nye (Kurniawan, 2009) yaitu definisi menyimpang dari tanggung jawab seharusnya sebagai petugas publik karena kepentingan pribadi (keluarga, kawan dekat), karena mengharapkan keuntungan uang atau status; atau pelanggaran aturan dengan memanfaatkan pengaruh pribadi.

Definisi yang berpusat pada pasar dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh van Klaveren (Kurniawan, 2009), yaitu seorang pegawai negeri yang korup menganggap kantornya sebagai sebuah usaha dan menghasilkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Kantor kemudian menjadi unit untuk dimaksimalkan. Sementara itu, definisi yang berpusat pada kepentingan publik dapat dilihat dari kutipan pernyataan Friederick (Kurniawan, 2009), yaitu pola korupsi dapat terjadi ketika seorang pemegang kekuasaan yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan sesuatu, kemudian akibat diberi uang atau hadiah yang sebenarnya tidak diperkenankan, mendukung atau mengambil tindakan yang sesuai dengan keinginan orang yang memberinya hadiah dan karena perbuatannya tersebut merusak kepentingan publik.

Berdasarkan tiga definisi tersebut, merupakan definisi tentang korupsi yang kesemuanya digunakan dalam penulisan ini, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tiga puluh bentuk/jenis dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam tiga belas buah pasal pada UU

tersebut. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; serta gratifikasi.

3. Faktor Penyebab Korupsi

Pemahaman mengenai penyebab korupsi yang dikarenakan oleh faktor penyebab langsung dan tidak langsung dapat dilihat dalam tulisan Tanzi (Kurniawan, 2009). Menurut Tanzi, terdapat setidaknya enam faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni:

- a. Pengaturan dan otorisasi;
- b. Perpajakan;
- c. Kebijakan pengeluaran/anggaran;
- d. Penyediaan barang dan jasa dibawah harga pasar;
- e. Kebijakan diskresi lainnya; serta
- f. Pembiayaan partai politik.

Sementara itu, penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya enam faktor, yakni:

- a. Kualitas birokrasi;
- b. Besaran gaji di sektor publik,
- c. Sistem hukuman;
- d. Pengawasan institusi;
- e. Transparansi aturan, hukum dan proses; serta
- f. Teladan dari pemimpin

Pendapat lain mengenai penyebab korupsi dapat dilihat dari tulisan Bull dan Newell (Kurniawan, 2009) dalam kaitannya dengan korupsi politik. Mereka membagi penyebab korupsi ke dalam empat faktor yang dianggap dapat mewakili faktor-faktor penyebab langsung maupun faktor yang memfasilitasi tumbuhnya korupsi yakni faktor sejarah, struktur dan budaya. Keempat faktor penyebab korupsi menurut Bull dan Newell adalah sebagai berikut:

- a. Budaya politik;
- b. Struktur dan institusi politik;
- c. Sistem kepartaian, partai pemerintah, partai politik, dan politisi; serta
- d. Ekonomi politik antara sektor publik dan sektor privat.

Sementara itu, dalam pandangan Shah (Kurniawan, 2009), terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor yakni

- a. Kualitas manajemen sektor publik;
- b. Sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat;
- c. kerangka hukum; serta
- d. Tingkatan proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi. Upaya mengatasi korupsi tanpa mempertimbangkan keempat faktor ini menurut Shah akan menyebabkan hasil yang kurang mendalam dan tidak berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian korupsi, defenisi korupsi serta faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, secara umum ternyata korupsi ini memberikan dampak kemiskinan bagi kehidupan dalam masyarakat, baik secara sosial,

ekonomi, politik, bahkan lingkungan. Sehingga dirasa penting akan adanya etika yang baik dalam menciptakan sikap atau perilaku anti korupsi, dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis akan fokus pada hubungan antara perilaku anti korupsi dengan hubungan kemiskinan sebagai dampak salah satu dari penyebab perilaku korupsi.

F. Tinjauan Tentang Kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ibrohim, 2017).

Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya (Ibrohim, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran serta yang dinamakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)(Rahmawati & Ispriyanti, 2017).

Jadi kemiskinan merupakan gejala *multidimensional*, yang dapat di telaah dari ekonomi, sosial dan politik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu dimana kemiskinan yang terjadi dengan situasi serba kekurangan, besarnya pengeluaran di bawah garis kemiskinan, adanya ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial seperti peralatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya keadaan tersebut bukan kehendak si miskin namun karena keadaan yang tidak mendukung seperti pemerintahannya yang korupsi.

2. Indikator Kemiskinan

Nanik Sudarwati (2009), Mengidentifikasi bahwa golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalahan berikut :

- a. Kurang mampu dalam meraih peluang ekonomi : peluang kerja, rendahnya upah, malas bekerja dan lain sebagainya.
- b. Sumber daya alam yang terbatas serta penguasaan aset produksi yang rendah : lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanan.
- c. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok.
- d. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.
- e. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh.
- f. Kekurangan kemampuan menyekolahkan anak.
- g. Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta kurang mendapat pelayanan kesehatan, air bersih, dan kebersihan lingkungan.

Bagi negara berkembang khususnya yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, maka kemiskinan bukanlah merupakan fenomena baru. Fenomena inilah yang lebih mempertegas garis stratifikasi dalam masyarakat. Adanya kemiskinan yang mengalami perjalanan panjang sehingga cenderung menjadi “kemiskinan absolut”.

3. Faktor–Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, berikut ini faktor penyebab kemiskinan menurut Suyanto, (Nurjanah, 2017).

Menurut pendapat Suyanto, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan dan diperkotaan, yaitu :

- a. Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.

- b. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan, disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (Itang, 2015) yaitu:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain seperti pendapatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Ginandjar (Nurwati, 2008) yaitu:

1. Rendahnya tingkat pendidikan,
2. Rendahnya derajat kesehatan,
3. Terbatasnya lapangan kerja,
4. Kondisi keterisolasian.

Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank (Nurwati, 2008) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu;

- a. Pendidikan,
- b. Jenis pekerjaan,
- c. Gender,
- d. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar
- e. Infrastruktur dan
- f. Lokasi geografis.

Dari beberapa indikator serta faktor-faktor penyebab terjadi kemiskinan yang sudah dijelaskan di atas ternyata dapat dilihat serta dapat dikaitkan dengan penelitian ini yaitu bahwa faktor kemiskinan ada hubungannya dengan perilaku korupsi, sehingga berdampak pada semua sisi kehidupan seperti faktor sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.

G. Kerangka Pikir

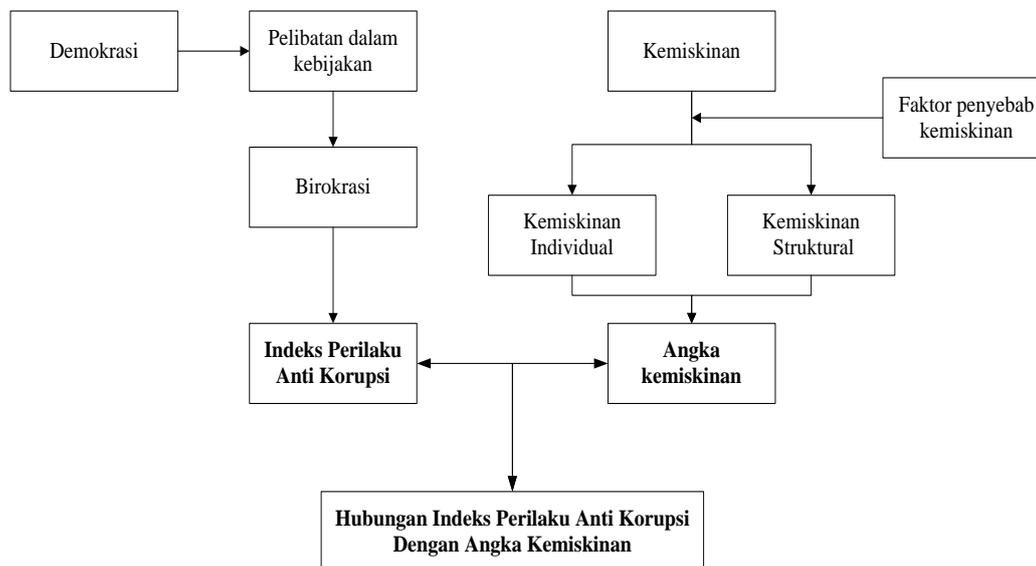
Perilaku korupsi yang bisa saja merugikan orang banyak bahkan suatu negara. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab salah satunya adalah menyebabkan fenomena kemiskinan. Maka fokus pada

penelitian ini menggunakan faktor penyebab kemiskinan berdasarkan dalam Ilmu Sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan individual. Adalah kemiskinan yang menimpa individu tertentu dalam suatu masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kurangnya ilmu pengetahuan, tidak aktif/kreatif, malas, dan sebagainya.
- b. Kemiskinan struktural. Adalah kemiskinan yang menimpa masyarakat yang disebabkan non-individual, maksudnya kemiskinan terjadi karena adanya pengaruh dari para orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di wilayah tersebut. Misalnya terjadinya kezaliman, dan adanya pemimpin yang korupsi.

Kemiskinan dan korupsi sudah tertuang dalam konsepsi lahirnya sebuah demokrasi yang menjadikan sebagai munculnya keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memberantas tindakan perilaku korupsi yang bahkan bisa menimbulkan kerugian dan kemiskinan di masyarakat, demokrasi yang memberikan pemahaman tentang hubungan kekuasaan baru di antara Penguasa dengan rakyat. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini merupakan sistem politik yang paling cocok untuk diterapkan. Sepanjang perjalanannya, demokrasi juga memberikan kebebasan setiap individu. Selain itu, aktivitas negara juga diimbangi dengan lembaga dan institusi yang memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, transparan, dan tidak melanggar hukum dengan mengutamakan kepentingan rakyat (publik). Maka fokus pada penelitian ini yaitu adanya sebuah pemahaman tentang perilaku anti korupsi sebagai sikap dari kekuasaan rakyat untuk melihat adanya perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan tindakan korupsi

sebagai konsep dari sebuah demokrasi sehingga adanya peahaman tentang indeks perilaku anti korupsi.



Gambar 2. Kerangka Pikir
(Sumber: diolah penulis, 2018)

H. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2010) perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2010) Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih:

Ho : Indeks perilaku anti korupsi tidak berhubungan yang signifikan dengan angka kemiskinan di Indonesia.

Ha : Indeks perilaku anti korupsi berhubungan secara signifikan dengan angka kemiskinan di Indonesia.

Apabila hipotesis nol (H_0) diterima (benar) maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif (H_a) diterima (benar) maka hipotesis nol (H_0) ditolak

Dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$, dan berdasarkan nilai signifikan, maka jika $\text{sign} > 0.05$, maka terima H_0 , kesimpulannya variabel indek perilaku anti korupsi tidak mempunyai hubungan secara nyata dengan angka kemiskinan. Sebaliknya jika $\text{sign} < 0.05$, maka tolak H_0 artinya diterima H_a , kesimpulannya variabel Indeks Perilaku anti korupsi secara nyata mempunyai hubungan yang signifikan dengan angka kemiskinan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel indeks perilaku anti korupsi dengan variabel kemiskinan, sehingga tipe penelitian yang digunakan yaitu *explanatory research*. Sesuai dengan Menurut (Hermawan, 2009) *explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Metode *explanatory research* dapat dikatakan sebagai penelitian untuk menguji hipotesis antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Indonesia dengan sumber data yang berpusat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan lingkup nasional. Mengingat saat ini kondisi korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

C. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia. Bersumber data skunder dari hasil survei indeks perilaku anti korupsi yang

dilakukan oleh BPS dan bekerjasama dengan badan perencanaan pembangunan nasional. BPS menyusun indeks ini dengan menggunakan dua dimensi besar, yakni persepsi masyarakat yang berupa penilaian mereka terhadap perilaku anti korupsi di masyarakat serta pengalaman masyarakat. Dimensi pengalaman ini mencakup pelayanan masyarakat ketika berhubungan dengan 10 (sepuluh) jenis pelayanan publik, di antaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), kepolisian, peradilan, layanan kesehatan, kantor desa dan kelurahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kantor Urusan Agama, serta RT/RW. Data hasil survei indeks perilaku anti korupsi ini yang digunakan mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan jumlah populasi secara level nasional yaitu dilakukan pada 33 Provinsi di seluruh Indonesia sehingga menghasilkan data indeks perilaku anti korupsi.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian tidak langsung yang diperoleh melalui media perantara dan data sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan. Menurut (Jogiyanto, 2010) mendefinisikan bahwa sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Jenis data yang digunakan adalah time series. Sumber data indeks perilaku anti korupsi dan angka kemiskinan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik dari tahun 2012-2017 (perkecualian di tahun 2016).

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2010) metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan mempelajari catatan-catatan atau dokumen Badan Pusat Statistik (data sekunder) yang ada. Data dalam penelitian ini di peroleh hasil indeks perilaku anti korupsi dan angka kemiskinan dari tahun 2012-2017 (perkecualian di tahun 2016).

F. Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan peneliti yaitu hubungan indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan di Indonesia, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas/independen (variabel X)

Definisi variabel bebas menurut (Sugiyono, 2010) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks perilaku anti korupsi (X).

2. Variabel terikat/dependen (variabel Y)

Definisi variabel terikat menurut (Sugiyono, 2010) adalah sebagai berikut: “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas”, dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah “angka kemiskinan”.

G. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa perhitungan untuk memperoleh informasi terkait variabel yang digunakan yaitu:

- a. Indeks perilaku anti korupsi. Hasil dari pengukuran persepsi/penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait anti korupsi di Indonesia. Indeks Perilaku Anti Korupsi juga mengukur sejauh mana budaya “*zero tolerance*” atau tidak mentolerir terhadap korupsi sudah terinternalisasi dalam setiap individu.
- b. Keadaan kemiskinan yang menunjukkan angka yang naik turun yang salah satu penyebabnya adalah adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pemerintah yang sedang berkuasa atau memimpin.

Sebagai masyarakat yang menganut sistem demokrasi atas rasa keadilan maka muncullah adanya sikap anti korupsi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi. Variabel-variabel dalam penelitian ini ada satu variabel independen yaitu indeks perilaku anti korupsi, dan satu variabel dependen yaitu angka kemiskinan. faktor penyebab kemiskinan berdasarkan dalam Ilmu Sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan individual. Adalah kemiskinan yang menimpa individu tertentu dalam suatu masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kurangnya ilmu pengetahuan, tidak aktif/kreatif, malas, dan sebagainya.
- b. Kemiskinan struktural. Adalah kemiskinan yang menimpa masyarakat yang disebabkan non-individual, maksudnya kemiskinan terjadi karena adanya pengaruh dari para orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di wilayah tersebut. Misalnya terjadinya kezaliman, dan adanya pemimpin yang korupsi.

Berdasarkan kedua konsep tersebut maka penulis akan meneliti hubungan kausalitas antara indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan di Indonesia sebagai wujud dari masyarakat yang menganut sistem demokrasi yang mengedepankan kepentingan orang banyak atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga tujuan kesejahteraan dari masyarakat dalam suatu bangsa bahkan negara bisa tercapai dengan baik.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian tentang variabel yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan (Sugiyono, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka variabel dalam penelitian ini berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, kedua variabel menggunakan skala rasio yang merupakan hasil pengukuran yang memiliki jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, yaitu pada penelitian ini data indeks perilaku anti korupsi dan angka kemiskinan

di Indonesia dari tahun 2012-2017. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tujuan indeks perilaku anti korupsi adalah mengukur persepsi/penilaian dan pengalaman individu terkait anti korupsi di Indonesia. Indeks perilaku anti korupsi juga mengukur sejauh mana budaya “*zero tolerance*” atau tidak mentolerir terhadap korupsi yang sudah terinternalisasi dalam setiap individu. Data indeks perilaku anti korupsi terdapat dua indikator yaitu indeks persepsi dan indeks pengalaman dalam perilaku korupsi sehingga data diperoleh dari tahun pertama dilakukan survei tentang perilaku anti korupsi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 indeks persepsi (lingkup keluarga, komunitas, layanan publik) dan indeks pengalaman (RT, RW, Kantor Desa, Polisi, PLN, Puskesmas, Guru, Lembaga Peradilan, KUA, Disdukcapil, BPN) Ruang lingkup survei indeks perilaku anti korupsi dilaksanakan di 170 kabupaten/kota di 33 Provinsi dengan jumlah seluruh sampel adalah 10.000 rumah tangga.
- b. Angka kemiskinan digunakan sebagai variabel terikat untuk mencari hubungannya dengan indeks perilaku anti korupsi, data angka kemiskinan bersumber dari dokumen Badan Pusat Statistik berdasarkan data time series dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Angka kemiskinan merupakan variabel yang bisa saja mempunyai hubungan dengan indeks perilaku anti korupsi, karena salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya perilaku korupsi. Namun untuk melihat hubungan signifikan atau tidaknya dengan anti korupsi maka akan dilakukan pengujian secara statistik.

I. Teknik Pengolahan Data Penelitian

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2010) statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang menyangkut data sampel. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki mengenai situasi sebenarnya dari suatu objek penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk melihat seberapa besar hubungan antara kedua variabel indeks perilaku anti korupsi (X) dan angka kemiskinan (Y). Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan di ketahui hubungan signifikan antara kedua variabel yang di teliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang di teliti.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel indeks perilaku anti korupsi dengan variabel angka kemiskinan apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Menurut (Sugiyono, 2010)

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Sumber: (Sugiyono, 2010)

Keterangan:

Y = angka kemiskinan (nilai yang diprediksikan)

X = indeks perilaku anti korupsi

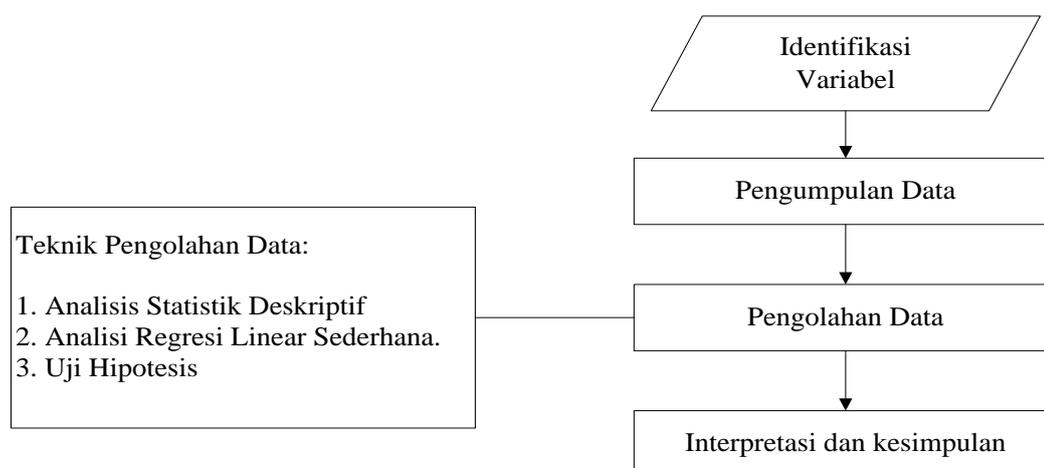
a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error term, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3. Alur Penelitian

Tahapan penelitian di atas akan dijelaskan melalui diagram penelitian seperti di bawah ini:



Gambar 3. Diagram Alur Penelitian

(Sumber: Diolah penulis, 2018)

J. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu indeks perilaku anti korupsi (X) dengan variabel dependen yaitu angka kemiskinan (Y). Untuk menguji variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) secara parsial maupun secara bersama-sama dilakukan dengan koefisien Determinasi (R_2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji f).

1. Uji parsial (Uji t)

Uji t merupakan jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Derajat kebebasan yang digunakan adalah $df = (n-k-1)$, dengan taraf yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis. Menurut (Sugiyono, 2010) nilai t dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: (Sugiyono, 2010)

Keterangan :

t = Statistik t dengan derajat bebas n-1

n = banyaknya observasi atau pengamatan

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Formulasi hipotesis:

- a. H_0 : indeks perilaku anti korupsi tidak berhubungan secara signifikan dengan angka kemiskinan.

- b. H_a : indeks perilaku anti korupsi berhubungan yang signifikan dengan angka kemiskinan.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika t hitung $>$ tabel pada taraf signifikan 95% maka H_0 ditolak, H_a diterima. Berarti ada hubungan variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen)
- b. Jika t hitung $<$ tabel pada taraf signifikan 95% maka H_0 diterima, H_a ditolak. Berarti tidak ada hubungan variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

2. Uji Simultan (uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan berhubungan secara bersama-sama terhadap suatu variabel dependen. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui variabel independen berhubungan signifikan terhadap variabel dependen yang diuji secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5% derajat bebas pembilang $df_1 = (k-1)$ dan derajat bebas penyebut $df_2 = (n-k)$, k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linear dan n merupakan jumlah pengamatan.

Menurut (Sugiyono, 2010) nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{r^2 / k}{(1 - r^2) / (n - k - 1)}$$

Sumber: (Sugiyono, 2010)

Keterangan:

F : pendekatan distribusi probabilitas fisher

n : Jumlah anggota sampel

k : Jumlah variable bebas

r^2 : Koefisien korelasi

Formulasi hipotesis:

Ho : indeks perilaku anti korupsi secara simultan tidak berhubungan secara signifikan dengan angka kemiskinan di Indonesia.

Ha : indeks perilaku anti korupsi secara simultan berhubungan secara signifikan dengan angka kemiskinan di Indonesia.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima
- b. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak

Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak.

3. Uji korelasi (r) atau Determinasi (R^2)

Uji korelasi (r) adalah uji yang dilakukan untuk mencari hubungan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Hasil korelasi positif mengartikan bahwa semakin besar variabel 1 menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2. Korelasi negatif mengartikan bahwa semakin besar nilai variabel 1 maka semakin kecil nilai variabel 2. Sedangkan korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada hubungan dua

variabel artinya tidak ada hubungan antar indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan.

Besarnya koefisien determinan adalah 0 sampai 1, semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula hubungan semua hubungan semua variable independen terhadap nilai variable independen. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variable indenpenden terhadap variable dependen.

Rumus koefisien determinasi menurut (Sugiyono, 2010) adalah:

$$R^2 = \frac{\beta_1 + \sum Xy}{\sum y}$$

Sumber: (Sugiyono, 2010)

Keterangan :

R^2 : Koefisien determinan

β_1 : Koefisien regresi variable dependen

x : indeks perilaku anti korupsi (Variabel dependen)

y : angka kemiskinan.

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

No.	Interval koefisien	Tingkat Hubungan
1	0, 001 – 0, 200	Sangat Lemah
2	0, 201 – 0, 400	Lemah
3	0, 401 – 0, 600	Cukup Lemah
4	0, 601 – 0, 800	Kuat
5	0, 801 – 1, 000	Sangat Kuat

Sumber:(Sugiyono, 2010)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada variabel indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,253 > 3,182$), dengan nilai sig. 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan berpengaruh secara signifikan.

Kemudian pada korelasinya (R) atau hubungan angka kemiskinan dengan variabel independen (indeks perilaku anti korupsi) adalah sangat kuat. Pada penelitian ini nilai koefisien R^2 dengan melihat nilai *R Square* sebesar 0,978 atau 97,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi variabel independen (indeks perilaku anti korupsi) yakni sebesar 97,8 %. Hal ini juga menggambarkan persentase hubungan variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan adalah sangat kuat.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan berpengaruh secara signifikan dengan kemiskinan serta memiliki hubungan yang bersifat positif. Artinya semakin tinggi pemahaman tentang perilaku anti korupsi maka semakin tinggi angka

kemiskinan di Indonesia. Pola hubungan seperti ini terjadi karena gangguan pada tata kelola pemerintahan.

B. Saran

Dengan melihat hasil hubungan yang positif antara variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan di perlukan sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang baik, wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik dalam menangani korupsi di Indonesia yaitu;

1. Survei indeks perilaku anti korupsi tidak hanya dilihat dari indeks persepsi dan indeks pengalaman masyarakat terhadap korupsi namun juga dilihat dari tata kelola pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas pelayan publik yang bebas korupsi akan meningkatkan skor IPAK dimasa yang akan datang.
3. Dari sisi penyedia pelayanan publik agar bebas dari praktek korupsi dan profesional dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen SDM aparatur sipil negara yang anti korupsi, reformasi birokrasi yang ramping dari sisi struktur serta kaya fungsi.
4. Dari sisi masyarakat sebagai penerima pelayan publik agar tidak menjadi korban pemerasan, pelaku penyuapan dan meniatkan relasi berbau nepotisme dengan aparatur sipil negara dilakukan dengan sosialisasi aturan dan prosedur layanan dengan semua media yang bisa diakses masyarakat.
5. Dari sisi aturan harus mengacu pada prinsip efisien, efektif dan mudah dan wajar untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemberi layanan (Brokrasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (2011). *Teori dan Konsp Administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, J. (2015). Pemberantasan Korupsi (melalui hukum pidana nasional dan internasional). In *PT RajaGrafindo Persada* (p. 4). Jakarta.
- Anggraini. (2011). *Analisis Korespondensi Hubungan Antara Kondisi Sekolah, Tenaga Pengajar, dan Sarana Belajar Terhadap Prestasi Sekolah (Studi Kasus SMA dan SMK Jakarta Selatan 2010)*. Jakarta.
- Bungin, B. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature. *Management Systems International*, 3-15.
- Donaldson, J. A., Loh, J., Mundaliar, S., Kadir, M. M., & Wu, B. (2013). Consideration, Measuring Poverty in Singapore: Frameworks For. *Singapore Management University Intitutional Knowledge at Singapore Management University*, 59-65.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(3), 241-253.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., et al. (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. In *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), UGM*. Yogyakarta.
- Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca-Reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Hermawan, A. (2009). *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ibrahim, R., & Yousuf, M. A. (2018). Patterns and Causes of Corruption Among Government Officials in Indonesia. *Journal of Public Administration and Business*;, 1(1).

- Ibrohim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi Kesenangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Pembangunan. *Ilmu dan budaya*, 40(55), 6306-6328.
- Indrawan, R. M., & Widiyanto, B. (2017). Korupsi Sebagai Bagian Dari Perang Proxy: Upaya Untuk Memberantas Bahaya Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pertanahan dan Bela Negara*, 7(1), 21-37.
- Itang. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(1), 1-28.
- Jogiyanto. (2010). *Analisis dan Desain Sistem Informasi Edisi IV*. Jakarta: Andi.
- Kumurotomo, W. (2015). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), 116-121.
- Lesnussa, Y. A., & Persulesy, E. R. (2017). Aplikasi Analisis Korespondensi Berganda Terhadap Pemetaan Perkembangan Pembangunan Kota Ambon. *Statistika*, 17(2), 89-97.
- Mahkota Negara, G., & Nasrudin, R. (2013). Analisis Hubungan Korupsi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia. *FE UI*.
- Marhaeni, H. (2017). Berita Resmi Statistik Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2017. *Badan Pusat Statistik*(58).
- Martha, J. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori dan Realita (Studi Kasus: Indonesia).
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nahumarury, N. (2013). Politisasi Hubungan Birokrasi dan Demokrasi. *Popolis*, 7(1).
- Nasution, Z. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Ecobisma*, 2(1), 1-10.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Nugroho, Y. D. (2018). Penerapan Regresi Logistik Hierarki Biner Untuk Menentukan Determinan Kemiskinan Di Bengkulu Dengan Menggunakan Indeks Aksesibilitas Sarana Umum (IASU) Sebagai Variabel Kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional*, 249-261.

- Nurjanah, I. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11.
- Quah, J. S. (2017). Singapore"s Succes in Combating Corruption: lessons for policy makers. *Asian Education and Development Studies*, 6(3), 263-274.
- Rahmawati, A. S., & Ispriyanti, D. (2017). Pemodelan Kasus Kemiskinan Di Jawa Tengah Menggunakan Regresi Nonparametrik Metode B-Spline. *Gaussian*, 6(1), 11-20.
- Ramli, S. (2017). Muqamat Tasawuf Dan Terapi Anti Korupsi (Studi Alternatif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia). *Studi AL-Qur'an membangun Tradisi Berfikir AL-Qur'an*, 13(2), 187-205.
- Sanit, A. (2004). Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 3-8.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. C.V. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- suhariyanto. (2017). *Indeks Prilaku Anti Korupsi 2017 Korupsi Skala Kecil di Indonesia Dalam Persepektif Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan Publik*. Jakarta: 04330.1703.
- Sulistio, E. B. (2016). *Birokrasi Publik (Public Bureaucracy)*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 23-41.
- Waluyo, j. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas Korupsi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Suatu Studi Lintas Negara Buletin Ekonomi*, 8(2).
- Widodo, J. (2001). Good Govrnance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisassi dan Otonomi Dearah. In *Insan cendekia*. Surabaya.
- Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 183-193.

Sumber website:

Sumber: *BPS 2017* (<https://www.bps.go.id/> diakses 08 Oktober 2018: pukul 20;05 WIB).

Sumber: <https://www.cpib.gov.sg.> Diakses pada 11 April 2019, pukul 14:21 Wib).